

ABSTRAK

Alasan pemilihan judul adalah bahwa Negara kesejahteraan menghendaki diwujudkannya Bangsa yang cerdas dan dapat bersaing di era GLOBAL oleh karena itu Pendidikan menjadi penting. Kegiatan pendidikan adalah kegiatan yang tidak boleh mencari keuntungan, oleh karena itu bentuk Badan Hukum Yayasan menjadi pilihan. Yayasan sebelum dapat beroperasi melaksanakan kegiatan Pendidikan harus mendapatkan Pengesahan. Pengesahan Yayasan adalah bentuk tindakan Tata Usaha Negara dalam rangka Pengesahan Yayasan. Ketika Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merugikan Masyarakat, maka dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) tersebut sah atau tidak sah. Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus sesuai dengan Kompetensinya masing-masing sesuai dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Pihak – pihak yang berperkara juga memiliki legal standing. Keputusan Kasasi pada Mahkamah Agung memutus dan memenangkan Tergugat dengan Alasan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tetapi menjadi wewenang Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Yayasan, Dan Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRACT

The reasons for selecting the title is that the welfare state requires the accomplishment of the Nation intelligent and able to compete in the era GLOBAL therefore education becomes important. Educational activity is an activity that should not be for profit, therefore the shape of Legal Foundations of choice. Foundation before it can operate conducting education should get Endorsement. Ratification Foundation is a form of action in the framework of the State Administrative Endorsement Foundation. When an administrative decision (KTUN) detrimental to the Community, it can be submitted to the State Administrative Court to examine the administrative decision (TUN) are valid or invalid. The court is authorized to investigate, hear and decide the case should be in accordance with their respective Competence in accordance with the Act - Act No. 5 of 2004 and the second Amendment Act - Act No. 3 of 2009 on the Supreme Court. Party - litigants also have legal standing. Appeal decision to the Supreme Court to decide and won the Defendant with reason instead of authority the State Administrative Court but the authority of the District Court.

Keywords : Institution Act Against The Law